



Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Analisis Hukum Peran dan Kedudukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) Sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF) Dalam Mengelola Investasi Masa Depan Bangsa

Hamit Tantio Lumban Gaol¹, Muhammad Fadil², Abdullah Fahrieza³, Akbar Fahrezi⁴, Salsa Azima⁵

^{1,2} Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

^{3,4,5} Universitas Andalas, Padang, 25163, Indonesia

*Corresponding Author: hamitgaol19@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 19 April 2025

Revised 8 May 2025

Accepted 10 May 2025

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Gaol, H.T.L. & dkk. (2025). Analisis Hukum Peran dan Kedudukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) Sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF) Dalam Mengelola Investasi Masa Depan Bangsa. *Recht Studiosum Law Review*, 4(1), 22-34.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<https://doi.org/10.32734/rslr.v4i1.20530>

ABSTRACT

The development of the investment climate in Indonesia is marked by the emergence of a Sovereign Wealth Fund (SWF) called Daya Anagata Nusantara (Danantara). This research aims to provide a legal analysis of the role and position of Daya Anagata Nusantara (Danantara) as a Sovereign Wealth Fund entity in Indonesia and compare it with the Sovereign Wealth Funds of Malaysia and Singapore. This study aims to explain the legal analysis of the role and position of Daya Anagata Nusantara (Danantara) as a Sovereign Wealth Fund entity in Indonesia. This research conducts a normative legal research method using a conceptual and comparative approach. This study shows that Danantara was established under the mandate of Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 concerning the Third Amendment to Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 on State-Owned Enterprise (Badan Usaha Milik Negara). As an executor, Danantara is responsible for managing state-owned enterprises (Badan Usaha Milik Negara), regulating dividends from investment holdings, operational holdings, and Badan Usaha Milik Negara, as well as approving the increase or reduction of state capital participation in Badan Usaha Milik Negara sourced from dividend management. This study also compares Danantara with Singapore's Sovereign Wealth Fund, Temasek Holdings, and Malaysia's Khazanah Nasional Berhad. Several differences in formation and operational aspects among these countries are highlighted in the comparison.

Keyword: Danantara, Investment, Sovereign Wealth Fund

ABSTRAK

Perkembangan iklim investasi di Indonesia ditandai dengan munculnya *Sovereign Wealth Fund* (SWF) yang bernama Daya Anagata Nusantara (Danantara). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan analisis hukum peran dan kedudukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai Badan Sovereign Wealth Fund di Indonesia serta perbandingannya dengan Sovereign Wealth Fund milik negara Malaysia dan Singapura. Penelitian ini metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Dari pembahasan didapat bahwasannya Danantara dibentuk atas amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Danantara sebagai pelaksana di lapangan (eksekutor) memiliki tugas untuk mengelola BUMN, mengatur dividen dari holding investasi, holding operasional, dan BUMN, serta menyetujui penambahan atau pengurangan penyertaan modal negara pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Di dalam penelitian ini juga

membandingkan Danantara dengan Sovereign Wealth Fund Temasek Holdings milik Singapura dan Khazanah Nasional Berhad milik Malaysia. Terdapat beberapa pembandingan dalam hal pembentukan serta operasional di masing-masing negara.

Keyword: Danantara, Investasi, Sovereign Wealth Fund

1. Pendahuluan

Investasi adalah sebagai salah satu instrumen perekonomian yang penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Keberadaan dana investasi jangka panjang yang dikelola secara profesional dan transparan sangat krusial. Hal ini dikarenakan keberadaan investasi jangka panjang memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Pertumbuhan ekonomi pada suatu negara menjadi pilar yang penting dalam menopang keberlangsungan negara tersebut terutama pada negara berkembang. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi di negara berkembang adalah suatu keperluan yang mendesak.¹

Seiring perkembangannya, sektor investasi mengalami perkembangan. Investasi menjadi salah satu alternatif alat untuk membangun negeri dalam meningkatkan pendapatan secara adil dan merata serta memiliki keterkaitan dengan kesejahteraan sosial.² Pemerintah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Salah satu adaptasi terhadap perkembangan investasi adalah Pembentukan badan *Sovereign Wealth Fund* (SWF). *Sovereign Wealth Fund* (SWF) adalah dana investasi khusus yang dibuat dan/atau dimiliki oleh pemerintah untuk menguasai aset-aset asing untuk dikelola secara jangka panjang.³ *Sovereign Wealth Fund* (SWF) menjadi salah satu strategi penting dalam mengelola investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi. Pembentukan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) pada dasarnya bertujuan untuk mengelola kekayaan negara agar dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Tujuan dari pembentukan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) digunakan untuk mengelola surplus anggaran, pendapatan dari sektor sumber daya alam, dan investasi strategis lainnya.

Menurut *International Working Group of Sovereign Wealth Funds* (IWG) tahun 2008,⁴ terdapat 3 tipe *Sovereign Wealth Fund* (SWF) yaitu: 1) *Sovereign Wealth Fund* (SWF) didirikan dengan identitas atau badan hukum yang terpisah, dengan kapasitas penuh untuk melakukan kegiatan dan diatur oleh Undang-undang khusus yang mengaturnya 2) *Sovereign Wealth Fund* (SWF) yang berbentuk perusahaan atau badan usaha milik negara (contohnya adalah *Temasek* dan *Government of Singapore Investment Corporation/GIC* dari Singapura) yang tunduk pada undang-undang tentang perusahaan dan/atau juga tunduk pada undang-undang tentang *Sovereign Wealth Fund* (SWF) apabila ada. 3) *Sovereign Wealth Fund* (SWF) yang berbentuk sekumpulan aset tanpa adanya identitas atau badan hukum tersendiri. Kumpulan aset tersebut bisa dimiliki langsung oleh pemerintah atau bisa juga dimiliki oleh bank sentral.

Salah satu contoh *Sovereign Wealth Fund* (SWF) adalah Singapura dengan nama *Temasek Holdings* yang telah dibangun pemerintah negara Singapura sejak tahun 1974.⁵ *Temasek* Singapura dibuat dengan tujuan agar ada suatu lembaga yang fokus memiliki dan mengelola dana investasi secara komersial. *Temasek* didirikan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Singapura tahun 1974 dengan pemegang saham tunggal Menteri Keuangan Singapura.⁶ *Temasek* ini bergerak di bidang pengelolaan transportasi, telekomunikasi, ilmu hayati dan pertanian pangan, media dan teknologi, layanan keuangan, konsumen dan real estate. Selain itu, sebagian besar investasi dalam *Temasek* ini berbentuk ekuitas yang dimiliki langsung oleh pemegang sahamnya dengan

¹ Hasan, M. & Azis, M. (2018). Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat, Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal. Edisi Kedua. Makassar: CV. Nur Lina, p. 6.

² Harjono, D.K. (2017). Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Jakarta: PT. Raja Grafindo, p. 6.

³ Beck, R. & Fidora, M. (2008). The Impact of Sovereign Wealth Funds on Global Financial Markets. *Intereconomics*, 43(6), 349-358.

⁴ Febriyanta, I. M. M. (2021). Mengenal Sovereign Wealth Fund, Dana Investasi untuk Masa Depan Bangsa. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13654/Mengenal-Sovereign-Wealth-Fund-Dana-Investasi-untuk-Masa-Depan-Bangsa.html>.

⁵ Artanti, A. A. (2025). Danantara Vs Temasek: Mengupas Struktur, Strategi, dan Prestasi. <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/akW2aX0b-danantara-vs-temasek-mengupas-struktur-strategi-dan-prestasi>

⁶ *Ibid*.

tujuan melakukan transformasi di bidang ekonomi, meningkatkan kualitas hidup kelas menengah, hingga memperdalam keuntungan komparatif.⁷

Selain itu terdapat *Sovereign Wealth Fund* Malaysia yang bernama Khazanah Nasional Berhad. Khazanah Nasional Berhad berdiri dengan didasarkan pada Undang-Undang Perusahaan Malaysia tahun 1965 tepatnya tanggal 3 September 1993 sebagai perusahaan terbatas publik.⁸ Tujuan Khazanah Nasional Berhad selain untuk mengembangkan kekayaan jangka panjang, juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mereka dengan adanya suatu badan khusus yang membidangi investasi dan manajemen bisnis.⁹ Khazanah Berhad juga bertujuan untuk menumbuhkan kekayaan jangka panjang melalui tujuan komersial dan strategis yang berbeda. Tujuan komersial yang dimaksud adalah untuk menumbuhkan aset keuangan dan mendiversifikasi (strategi untuk mengurangi risiko dengan cara menyebar dana ke berbagai instrument).

Sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang besar, Indonesia memerlukan pengelolaan investasi yang cermat agar dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Salah satu entitas *Sovereign Wealth Fund* (SWF) di Indonesia yang menjadi sorotan adalah Daya Anagata Nusantara (Danantara). Danantara dibentuk atas dasar perubahan ketiga Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).¹⁰ Tujuan dari dibentuknya Danantara adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mengoptimalkan dividen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga bertujuan sebagai badan pengelola investasi strategis yang mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan pusat investasinya berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).¹¹

Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai salah satu *Sovereign Wealth Fund* (SWF) memiliki perbedaan dalam pembentukan, pendirian, serta fungsi operasionalnya dari *Sovereign Wealth Fund* (SWF) Singapura Temasek Holdings dan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) Malaysia yaitu Khazanah Nasional Berhad. Oleh karena itu, Danantara sebagai *Sovereign Wealth Fund* (SWF) yang akan mengelola investasi di Indonesia memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia, sehingga penulisan jurnal ini menjadi relevan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsepsi dasar Danantara itu sendiri serta bagaimana peran dan kedudukannya sebagai badan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) di Indonesia, kemudian dengan melakukan praktik perbandingan terhadap negara-negara lain yang telah terlebih dahulu dan terbukti sukses dalam mengelola *Sovereign Wealth Fund* (SWF) di negara mereka, tulisan ini diharapkan dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sistem pengelolaan yang diterapkan di Indonesia sekarang, sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan Danantara dalam meningkatkan investasi dan perekonomian masyarakat Indonesia. Melalui pendekatan komparatif tersebut juga diperoleh sejumlah pertimbangan yang dapat diakomodasi pemerintah, dalam upaya perbaikan terhadap kebijakan hukum nasional dan pengelolaan Danantara di waktu yang akan datang. Sehingga tulisan ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan tetapi juga memberikan kontribusi dalam mendorong upaya perbaikan dan memaksimalkan pengelolaan investasi di Indonesia melalui Danantara.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan data sekunder yang didukung oleh data kepustakaan. Di dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk melihat bagaimana aspek pengaturan dan kedudukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Indonesia. Selain itu, pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai *Sovereign Wealth Fund* (SWF) memiliki kedudukan hukum serta fungsinya di Indonesia dibandingkan dengan negara Malaysia dan Singapura. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan fokusnya pada penyajian

⁷ Tempo. (2024). Mengenal Temasek Holdings, BUMN Singapura yang Disebut-sebut Akan Ditiru Prabowo. <https://swa.co.id/read/451853/mengenal-temasek-holdings-bumn-singapura-yang-disebut-sebut-akan-ditiru-prabowo>

⁸ Internasional Forum of Sovereign Wealth Fund (IFSOF). (2025). Khazanah Nasional Berhad. <https://www.ifsowf.org/member-profiles/khazanah-nasional>

⁹ Sinar Harian. (2025). Khazanah Nasional Berada di Landasan Tepat. <https://www.astroawani.com/berita-bisnes/khazanah-nasional-berada-di-landasan-tepat-508019>

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

¹¹ Danantara Indonesia Sovereign Fund. (2025). Daya Anagata Nusantara: Untuk Kemakmuran Indonesia. <http://www.danantara.id/>

dan analisis masalah yang terkait dengan analisis hukum serta perbandingan Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai *Sovereign Wealth Fund* (SWF) dibandingkan dengan negara Malaysia dan Singapura.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsepsi dasar badan *Sovereign Wealth Fund* (SWF)

Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan pembentukan Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah badan yang berperan sebagai penasihat dalam pengelolaan investasi serta dana publik. Konsep ini serupa dengan *Sovereign Wealth Fund* (SWF), yang di berbagai negara berfungsi sebagai perusahaan pengelola aset independen milik negara. Sumber pendanaan SWF dapat berasal dari cadangan devisa, hasil privatisasi, kelebihan dana, maupun pendapatan dari sumber daya alam. SWF menjadi instrumen penting bagi Indonesia dalam mengatasi kebutuhan pembiayaan pembangunan, terutama dalam jangka pendek.¹²

Sejumlah negara telah membuktikan bahwa SWF dapat mendukung pembangunan, seperti Norwegia yang berhasil mengelola pendapatan dari sektor minyaknya hingga menciptakan SWF terbesar di dunia. Pemerintah Norwegia telah menghimpun aset lebih dari 1 triliun dolar AS untuk populasi sekitar 5,33 juta jiwa, menjadikan warganya sebagai salah satu yang terkaya dengan kepemilikan dana rata-rata sebesar 207 ribu dolar per orang. Dana ini diinvestasikan dalam bentuk saham dan obligasi yang mengikuti dinamika pasar keuangan global. Dengan portofolio yang luas, SWF Norwegia telah berinvestasi di 74 negara, lebih dari 9.200 perusahaan, dan memiliki sekitar 1,5% saham dari seluruh perusahaan publik di dunia. SWF ini pertama kali didirikan pada tahun 1996 sebagai upaya melestarikan pendapatan dari sektor minyak serta sebagai strategi diversifikasi ekonomi. Keuntungan yang dihasilkan bahkan mampu menutupi seperempat dari anggaran tahunan pemerintah Norwegia.¹³

Meskipun memiliki tujuan serupa, model SWF Indonesia sedikit berbeda karena lebih berfokus pada penggalangan serta pengelolaan dana investasi asing untuk membiayai proyek nasional. Sementara itu, di negara-negara maju, SWF berperan dalam mengelola dan mengoptimalkan surplus kekayaan negara agar tetap stabil meskipun terjadi krisis ekonomi. Saat ini, SWF Indonesia telah beroperasi dengan modal awal sebesar 5 miliar dolar AS dari pemerintah, dan telah menarik perhatian banyak investor asing karena nilai serta prospek proyek yang ditawarkan. Bonus demografi yang dimiliki Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi investor.

Selama ini, pemerintah telah berupaya meningkatkan produktivitas dengan membangun infrastruktur guna memanfaatkan bonus demografi. Sebab, jika tidak dimanfaatkan dengan baik, Indonesia berisiko mengalami *middle income trap*, atau terjebak dalam kondisi ekonomi menengah sebelum mencapai kemakmuran, seperti yang telah diperingatkan oleh Bank Dunia. Sayangnya, pembangunan infrastruktur yang masif justru membebani neraca keuangan BUMN dan meningkatkan utang negara. Kebutuhan pendanaan yang terus meningkat berbanding terbalik dengan kapasitas pembiayaan yang terbatas, sementara investasi asing yang masuk cenderung stagnan, menyebabkan rasio utang terhadap PDB semakin besar.

Dalam kondisi inilah SWF hadir sebagai alternatif pendanaan proyek dengan tingkat risiko lebih rendah karena pembagian potensi serta risiko dengan investor. Terlebih di tengah pandemi, menciptakan lingkungan investasi yang kondusif menjadi langkah penting untuk memulihkan ekonomi. Selain mendorong daya beli, investasi juga diharapkan mampu membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat usia produktif, yang pada akhirnya dapat mempercepat Indonesia menjadi negara maju. Momentum bonus demografi yang saat ini terjadi tidak boleh disia-siakan, terutama mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan hanya sekitar 6% hingga tahun 2030. Oleh karena itu, pemerintah berharap SWF dapat menjadi solusi untuk menghindari jebakan ekonomi menengah tanpa menambah beban utang negara yang sudah cukup tinggi.¹⁴

Namun, efektivitas SWF masih sulit diukur dalam waktu dekat. Meskipun memiliki potensi besar, tantangan serta risiko yang dihadapi juga tidak sedikit. Dengan jumlah dana yang sangat besar, Indonesia harus memastikan bahwa SWF dikelola secara transparan dan profesional guna mencegah korupsi. Oleh karena itu, pengelolaannya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik agar dapat mempertahankan

¹² Qurani, H. (2021). Mengupas Konsep Sovereign Wealth Fund Indonesia. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt616068b2a7ec4/mengupas-konsep-sovereign-wealth-fund-indonesia/>

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

kepercayaan investor. Kendati demikian, SWF Indonesia tetap diyakini akan menarik banyak investasi asing serta memberikan manfaat signifikan bagi perekonomian nasional.

3.2 Peran dan kedudukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai badan Sovereign Wealth Fund (SWF) di Indonesia

Dana kekayaan negara atau disebut *Sovereign Wealth Fund* (SWF) merupakan dana investasi tujuan khusus yang dimiliki, dikelola dan/atau dibuat oleh pemerintah untuk memegang atau menguasai aset-aset asing untuk tujuan jangka panjang.¹⁵ Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai *Sovereign Wealth Fund* telah secara resmi diluncurkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengelola aset yang mencapai US\$ 900 miliar atau setara dengan Rp 14.665 triliun.¹⁶ Berbeda dari *Sovereign Wealth Fund* beberapa negara yang sumber dananya berasal dari surplus keuangan negara seperti pendapatan sumber daya alam berupa minyak, gas, atau mineral, cadangan devisa, atau hasil privatisasi aset negara. Indonesia tidak memakai dana berbasis sumber daya alam. Danantara Indonesia berfokus pada pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi digital untuk menarik minat investor global yang ingin memanfaatkan pertumbuhan ekonomi negara ini.¹⁷

Secara kelembagaan, Indonesia sebenarnya telah memiliki *Indonesia Investment Authority* (INA) yang bertugas mengelola dan mengembangkan aset negara. INA didirikan berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Cipta Kerja yang menghendaki dibentuknya *Sovereign Wealth Fund* yang merupakan lembaga dengan kewenangan khusus dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah pusat, dan didukung oleh regulasi yang memberikan otonomi manajemen serta fleksibilitas operasional. Namun, dengan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat strategis, menarik investasi global yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat, sehingga pada 4 Februari 2025 Presiden Prabowo mengesahkan Danantara sebagai badan yang akan melakukan pengelolaan terhadap dividen holding operasional, holding investasi, dan holding BUMN secara menyeluruh. Adapun dengan adanya Danantara sebagai *Sovereign Wealth Fund* baru tidak serta merta akan meniadakan keberadaan INA, melalui perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN inilah menjadi dasar hukum terbentuknya Danantara. Aturan terbaru mengenai BUMN ini mencakup pengaturan tugas dan fungsi Danantara dalam perannya sebagai Badan Pengelola Investasi. Danantara akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sementara INA berada di bawah tanggung jawab Menteri Keuangan. Dalam hal ini terdapat rencana INA akan digabungkan ke dalam struktur Danantara Ke depan.

Penerapan *hands-on ownership* dan *hands-on management* dalam pengelolaan BUMN membutuhkan stabilitas antara kontrol dan otonomi. Sebagai *super holding* BUMN, Danantara mendorong partisipasi aktif pemegang saham yakni pemerintah, dalam hal pengawasan dan penentuan arah strategis. Di sisi lain, tim manajemen BUMN diharapkan memiliki kompetensi profesional dan independensi untuk mengelola perusahaan secara efisien.¹⁸ Peran pemegang saham yang diwakili oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN sebagai regulator yang memiliki hak, antara lain memberikan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mengajukan agenda RUPS, meminta serta mengakses data dan dokumen perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, mereka juga berwenang menetapkan pedoman atau kebijakan strategis di bidang akuntansi dan keuangan, pengembangan dan investasi, serta operasional dan pengadaan barang dan/atau jasa. Serta peran Danantara sebagai pelaksana di lapangan (eksekutor) memiliki tugas untuk mengelola BUMN, mengatur dividen dari *holding* investasi, *holding* operasional, dan BUMN, serta menyetujui penambahan atau pengurangan penyertaan modal negara pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Selain itu, lembaga ini akan berperan dalam menyetujui proses restrukturisasi BUMN, termasuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan, serta membentuk holding investasi,

¹⁵ Jamaludin, M. (2023). Indonesia Investment Authority sebagai SWF Indonesia Untuk Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 1(2), 283–301. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i2.364>

¹⁶ CNN Indonesia. (2025). Mengenal Sovereign Wealth Fund di Tengah Peluncuran Danantara. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250224145053-92-1201856/mengenal-sovereign-wealth-fund-di-tengah-peluncuran-danantara>

¹⁷ Baihaqi, B. (2025). Danantara Disebut Sebagai SWF Terkuat ke 6 di Dunia. <https://www.neraca.co.id/article/216345/danantara-disebut-sebagai-swf-terkuat-ke-6-di-dunia>

¹⁸ Ali, S. (2025). Mengenal Danantara, ‘Barang Baru’ di Era Prabowo. Diakses dari <https://umj.ac.id/opini/mengenal-danantara-barang-baru-di-era-prabowo/>

holding operasional, dan BUMN. Lembaga ini juga bertugas mengesahkan dan berkonsultasi dengan DPR terkait rencana kerja dan anggaran perusahaan holding investasi dan holding operasional.¹⁹

Tata kelola ini juga menjamin bahwa BUMN tetap berorientasi pada pencapaian target nasional, menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dengan demikian, sinergi yang tepat antara *hands-on ownership* dan *hands-on management* akan meningkatkan daya saing BUMN, sekaligus melindungi kepentingan publik yang menjadi tanggung jawab negara melalui perusahaan tersebut. Hal ini karena pengelolaan BUMN tidak hanya berfokus pada tujuan komersial, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat (*Public Service Obligation/PSO*), seperti yang dilakukan oleh PLN dan Pertamina.

Adapun tujuan pendirian Danantara sama dengan dibentuknya INA sebagai Lembaga Pengelola Investasi sebagai bentuk respon atas kebutuhan pembiayaan dan penambahan investasi. Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja lembaga tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset secara jangka panjang dalam skema dana abadi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.²⁰ Menurut ekonom Universitas Gadjah Mada, Eddy Junarsin pendirian Danantara pada dasarnya memiliki tujuan positif, yaitu untuk mengkonsolidasi pengelolaan aset negara dari perusahaan-perusahaan BUMN agar lebih transparan dan terkoordinasi dengan baik. Dengan adanya *holding company* ini, setiap perusahaan akan lebih terbuka karena Danantara bertugas menunjuk dan mengawasi dewan komisaris serta dewan direksi secara langsung. Selama ini, proses penunjukan dewan komisaris dan dewan direksi dilakukan oleh kementerian, yang seringkali tidak disertai dengan alasan dan evaluasi yang memadai.²¹

Selain itu, Danantara memiliki peran strategis sebagai instrumen hukum yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi alokasi modal serta mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi di sektor-sektor prioritas. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan investasi negara, Danantara diharapkan mampu memperkuat sinergi antar-BUMN dan menarik investasi asing guna meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dengan model investasi berbasis hukum administrasi negara, mekanisme pengelolaan Danantara lebih fleksibel dibandingkan skema pembiayaan yang hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).²² Danantara diharapkan dapat mendukung BUMN dalam mewujudkan transparansi dan tata kelola yang baik. Dalam pengelolaan BUMN, Danantara memastikan bahwa seluruh BUMN dijalankan sesuai dengan prinsip *good corporate governance* dan melibatkan investor profesional, sambil menerapkan prinsip akuntabilitas dan efisiensi dalam proyek-proyek yang dibiayai.²³

3.3 Perbandingan Badan Sovereign Wealth Fund (SWF) di berbagai negara

3.3.1 Singapore

Singapura adalah salah satu pemilik badan *Sovereign Wealth Fund (SWF)* terbesar di dunia dengan nama *Temasek Holdings* yang telah lama sukses mengelola aset negara. *Temasek* ini sendiri telah dibangun pemerintah negara Singapura sejak tahun 1974.²⁴ *Temasek* Singapura dibuat dengan tujuan agar ada suatu lembaga yang fokus memiliki dan mengelola dana investasi secara komersial. Dalam perkembangannya, *Temasek* juga didukung 13 kantor di Sembilan negara yaitu Beijing, Hanoi, Mumbai, Shanghai, Shenzhen, London, Brussels, New York, San Francisco, Washington DC, Mexico City, dan São Paulo. Luasnya jangkauan *Temasek* sebagai badan SWF membuat negara ini semakin dikenal dengan kemampuan mereka mengelola aset negaranya. Hingga 31 Maret 2024 lalu *Temasek* berhasil memiliki portofolio sebesar S\$389 miliar atau setara dengan Rp 4.000 Triliun.²⁵

¹⁹ Wahyuni, W. (2025). Mengenal Danantara dan Dasar Hukumnya. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-danantara-dan-dasar-hukumnya-lt67b5de78c441a/?page=2>.

²⁰ Kusuma, D. C. (2022) Analisis Lembaga Pengelola Investasi Sebagai Sovereign Wealth Fund Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, p. 64.

²¹ Grehenson, G. (2025). Pakar UGM Ungkap Dampak Positif dan Negatif Kemunculan Danantara, Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/pakar-ugm-ungkap-dampak-positif-dan-negatif-kemunculan-danantara/>

²² Nasoha, A. M. M. (2025). Danantara: Reformasi Investasi Strategis dalam Hukum dan Ekonomi. Fakultas Syariah UIN Surakarta. <https://syariah.uinsaid.ac.id/danantara-reformasi-investasi-strategis-dalam-hukum-dan-ekonomi/>

²³ Sampor Ali. *Op.cit.*

²⁴ Artanti, A. A. (2025). Danantara Vs Temasek: Mengupas Struktur, Strategi, dan Prestasi. <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/akW2aX0b-danantara-vs-temasek-mengupas-struktur-strategi-dan-prestasi>

²⁵ Tempo. (2024). Mengenal Temasek Holdings, BUMN Singapura yang Disebut-sebut Akan Ditiru Prabowo. <https://swa.co.id/read/451853/mengenal-temasek-holdings-bumn-singapura-yang-disebut-sebut-akan-ditiru-prabowo>

²⁶ Temasek. (2025). History of Temasek. <https://www.temasek.com.sg/en/about-us/history-of-temasek>

Dalam pengaturannya, *Temasek* didirikan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Singapura tahun 1974, dengan pemegang saham tunggalnya adalah Menteri Keuangan Singapura.²⁶ *Temasek* ini bergerak di bidang pengelolaan transportasi, telekomunikasi, ilmu hayati dan pertanian pangan, media dan teknologi, layanan keuangan, konsumen dan real estate. Selain itu, sebagian besar investasi dalam *Temasek* ini berbentuk ekuitas yang dimiliki langsung oleh pemegang sahamnya dengan tujuan melakukan transformasi di bidang ekonomi, meningkatkan kualitas hidup kelas menengah, hingga memperdalam keuntungan komparatif.²⁷

Lahirnya *Temasek* di Singapura adalah karena kesadaran akan pentingnya memisahkan tanggung jawab pemerintah yang berperan membuat kebijakan dan tata kelola pemerintahan dari manajemen bisnis. Sehingga dengan kata lain bukan tugas pemerintah untuk mengoperasikan bisnis yang dimilikinya. Prinsip inilah yang mendorong didirikannya *Temasek* oleh Pemerintah Singapura untuk memiliki dan mengelola aset-aset yang mereka miliki. Sebagai perusahaan komersial, yang berperan mengatur *Temasek* adalah Dewan Independen yang mayoritas diisi oleh pemimpin bisnis sektor swasta non-eksekutif dan independen yang benar-benar dipisahkan dari campur tangan pemerintah sehingga *Temasek* mampu bekerja tanpa ada unsur politik dan bersaing di lapangan usaha yang setara.²⁸

3.3.2 Malaysia

Selain Singapura, negara lain seperti Malaysia pun turut memiliki badan *Sovereign Wealth Fund (SWF)* yang bernama *Khazanah Nasional Berhad* yang juga fokus pada pengelolaan investasi jangka panjang milik pemerintah Malaysia. *Khazanah Nasional Berhad* berdiri dengan didasarkan pada Undang-Undang Perusahaan Malaysia tahun 1965 tepatnya tanggal 3 September 1993 sebagai perusahaan terbatas publik.²⁹

Sama halnya dengan *Temasek Holdings*, tujuan *Khazanah Nasional Berhad* ini dibuat oleh negara Malaysia adalah untuk mengembangkan kekayaan jangka panjang, dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mereka dengan adanya suatu badan khusus yang membidangi investasi dan manajemen bisnis.³⁰ *Khazanah* sebagai SWF dipercayakan untuk menumbuhkan kekayaan jangka panjang melalui tujuan komersial dan strategis yang berbeda. Tujuan komersial yang dimaksud adalah untuk menumbuhkan aset keuangan dan mendiversifikasi (strategi untuk mengurangi risiko dengan cara menyebar dana ke berbagai instrument). Sedangkan tujuan strategisnya adalah tercapainya manfaat jangka panjang.³¹

Dilansir dari website resmi *Khazanah Nasional* tujuan utama adanya badan ini adalah untuk memberikan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko jangka panjang yang kuat di seluruh portofolio, selain itu tujuan besar lain yang ingin dicapai dengan adanya *Khazanah Nasional* ini adalah mengkatalisasi pertumbuhan sektor dan perusahaan yang sedang berkembang di Malaysia. Berkontribusi terhadap upaya daya saing dan kemakmuran masyarakat dalam jangka panjang.³² Melihat dua badan *Sovereign Wealth Fund (SWF)* yaitu *Temasek* di Singapura dan *Khazanah* di Malaysia menunjukkan adanya upaya kedua negara tersebut untuk menciptakan suatu pola investasi jangka panjang yang terstruktur dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat banyak sebagai tanggung jawab pemerintah dalam melindungi seluruh masyarakatnya.

3.4 Lesson learned dari negara-negara pembanding terkait dengan peran dan kedudukan Badan Sovereign Fund (SWF)

Indonesia yang baru meluncurkan suatu badan *Sovereign Wealth Fund (SWF)* yang disebut Daya Anagata Nusantara (Danantara) yaitu badan pengelola investasi strategis yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan pusat investasinya berasal dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara),³³ perlu melakukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana pengelolaan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Temasek. (2025). History of Temasek. <https://www.temasek.com.sg/en/about-us/history-of-temasek>

²⁹ Internasional Forum of Sovereign Wealth Fund (IFSWF). *Khazanah Nasional Berhad*. <https://www.ifswf.org/member-profiles/khazanah-nasional>

³⁰ Sinar Harian. (2025). *Khazanah Nasional Berada di Landasan Tepat*. <https://www.astroawani.com/berita-bisnes/khazanah-nasional-berada-di-landasan-tepat-508019>

³¹ Setiawan, A. (2021). *Khazanah raih Rp1,1 triliun dari penempatan saham Telekom Malaysia*. <https://www.antaraneews.com/berita/2103118/khazanah-raih-rp11-triliun-dari-penempatan-saham-telekom-malaysia>

³² *Khazanah Nasional*. (2025). *Memajukan Malaysia Untuk Jangka Panjang*. Diakses dari <https://www.khazanah.com.my/who-we-are/about-us/>

³³ Danantara Indonesia Sovereign Fund. (2025). *Daya Anagata Nusantara: Untuk Kemakmuran Indonesia*. <http://www.danantara.id/>

Danantara, struktur kepengurusannya, pengaturan hukum, tujuan, dan apa hasil yang akan dicapai dengan adanya Danantara tersebut. Singapura dan Malaysia sebagai negara yang terlebih dahulu memiliki badan SWF dapat menjadi rujukan Indonesia dalam memaksimalkan pengelolaan Danantara untuk mencapai tujuan yang ingin didapatkan.

Jika merujuk pada pembahasan sebelumnya mengenai *Temasek Holdings* (Singapura) dan *Khazanah Nasional Berhad* (Malaysia) dapat diketahui bahwa kedua badan SWF tersebut berada langsung dibawah Kementerian Keuangan negara mereka, namun dalam hal ini pemerintah tidak sama sekali ikut campur atau dengan kata lain tidak terlibat secara langsung³⁴ dalam manajemen bisnis yang ada dalam kedua badan SWF tersebut, hal ini adalah sebagai upaya untuk menjamin dan memisahkan antara urusan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan manajemen dan tata kelola bisnis dalam mengelola investasi negara.

Berbeda dengan SWF Singapura dan Malaysia yang mengesahkan SWF mereka dengan Undang-Undang Perusahaan negaranya, Indonesia sendiri mengesahkan Danantara dengan berlandaskan pada persetujuan DPR akan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang kemudian disahkan DPR menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 pada 4 Februari 2025,³⁵ yang menjadi dasar hukum pengaturan dalam pengelolaan Danantara kedepannya.

Danantara dibentuk bertujuan untuk mengelola dana investasi yang berasal dari perusahaan-perusahaan plat merah untuk upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Meskipun dana yang dikelola Danantara ini nantinya berasal dari BUMN namun yang menjadi pengelola tunggal diserahkan sepenuhnya kepada Danantara dan BUMN hanya berperan sebagai regulator dan pengawas.³⁶ Satu hal yang dilakukan oleh negara Singapura dalam kesuksesan mereka dalam pengelolaan *Temasek Holdings* adalah dengan adanya pengawasan yang melibatkan seluruh elemen baik dari pemerintah, parlemen, dan juga masyarakat. Dalam pelaksanaannya ada dua hal unik yang dilakukan oleh Singapura dalam menyukseskan peran *Temasek Holding* dalam meningkatkan peluang investasi dan peningkatan ekonomi di negara mereka. Pertama, presiden Singapura berhak mengangkat dan memberhentikan direktur dan manajer kunci, termasuk CEO, kemudian dewan dan CEO bertanggung jawab kepada presiden. Selain itu, dalam kepengurusannya mayoritas direktur dan pejabat kunci *Temasek* merupakan direktur independen dan berasal dari sektor swasta. Hal ini bertujuan untuk menjamin tidak adanya kepentingan-kepentingan yang berpotensi merusak tujuan yang ingin dicapai badan SWF tersebut.

Kedua, *Temasek* juga selalu rutin melaporkan laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh Auditor Jenderal Pemerintah Singapura,³⁷ sehingga ada keterbukaan dan akuntabilitas bagaimana pengelolaan dana investasi yang dilakukan perusahaan tersebut, sehingga kemungkinan terjadi penyalahgunaan kewenangan atau konflik kepentingan dapat diminimalisir demi tujuan mencapai kesuksesan perusahaan tersebut dalam melakukan pengelolaan dana investasi negara untuk tujuan kemakmuran masyarakat banyak.

Berdasarkan laporan CNBC Indonesia, peluang besaran investasi yang akan dikelola oleh Danantara mencapai RP9.000 triliun dengan menaungi tujuh BUMN besar di tahap pertama termasuk diantaranya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Selain ketujuh BUMN tersebut, rencananya Danantara juga akan menaungi Indonesia Investment Authority (INA) SWF yang sudah terlebih dahulu ada di Indonesia, Dengan demikian total *asset under management* (AUM) Danantara akan mencapai sekitar Rp9.049 triliun atau sekitar US\$571,6 miliar. Lalu, beberapa tahun kedepan Danantara diperkirakan akan mengelola aset sebesar US\$982 miliar atau Rp15.547 triliun (kurs 15.832).³⁸

³⁴ Segal, T. (2025). What Is Temasek Holdings? Understanding Its Role and Investment Strategy. Diakses dari <https://www.investopedia.com/terms/t/temasek-holdings.asp>

³⁵ Wirayuda, R. (2025). Antara Temasek, 1MBD, dan Danantara. Diakses dari <https://www.historia.id/article/antara-temasek-1mdb-dan-danantara-6mgE9>

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Segal, T. (2025). What Is Temasek Holdings? Understanding Its Role and Investment Strategy. Diakses dari <https://www.investopedia.com/terms/t/temasek-holdings.asp>

³⁸ Revo, M. (2024). RI Punya Danantara: Ini 10 Dana Investasi Pemerintah Penguasa Dunia. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/research/20241107110729-128-586396/ri-punya-danantara-ini-10-dana-investasi-pemerintah-penguasa-dunia>

Namun yang menjadi permasalahan adalah, adanya beberapa kontroversi yang muncul dan menimbulkan kekhawatiran akan efektivitas pengelolaan Danantara sebagai badan SWF di Indonesia. Pertama, mengenai pengelolaan dana Danantara yang bersumber dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) tentu memicu pertanyaan bagaimana jika terjadi kebijakan yang salah dan bagaimana penyelesaiannya? Karena hal ini akan sangat berdampak pada perekonomian negara. Salah satu aspek yang paling mengkhawatirkan adalah potensi monopoli ekonomi yang terjadi akibat penguasaan hampir seluruh aset BUMN oleh Danantara. Dengan posisi dominannya, Danantara bisa memiliki kendali penuh atas berbagai sektor strategis dari energi, infrastruktur, keuangan, hingga industri manufaktur. Kondisi ini bisa menghambat persaingan usaha yang sehat, terutama bagi perusahaan swasta yang tidak memiliki akses ke sumber daya sebesar Danantara.³⁹ Sejauh ini juga tidak ada penjelasan komprehensif yang disampaikan pemerintah mengenai tata kelola yang akan dilakukan dalam memaksimalkan pengelolaan seluruh dana dari BUMN yang akan dimasukkan ke Danantara, sehingga tidak ada transparansi yang terjadi.

Selain itu, dalam Pasal 3H ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN sebagai landasan hukum Danantara menegaskan bahwa kerugian Danantara bukan kategori kerugian keuangan negara. Di sisi lain, Pasal 3G Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN dengan jelas mengatur sumber modal Danantara berasal dari Penyertaan Modal Negara, yang dapat berupa dana tunai, barang milik negara, dan saham milik negara pada BUMN, serta berasal dari sumber lain yang tidak dijelaskan secara spesifik dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan sebagaimana pendapat Muhammad Saleh yaitu peneliti Center for Economics and Law Studies (Celios) yang mengatakan “Mengeluarkan kerugian Danantara dari kategori keuangan negara berisiko menciptakan ruang abu-abu dalam pengelolaan dana publik (termasuk pajak masyarakat), yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu tanpa pengawasan yang memadai”. Tentunya ini menjadi kekhawatiran ketika di masa yang akan datang terjadi kerugian dan hal itu berdampak pada masyarakat banyak karena sebagaimana diketahui bahwa sebagian sumber dana investasi Danantara itu berasal dari bank-bank di Indonesia.⁴⁰

Kemudian, jika melihat struktur kepengurusan Danantara sekarang ini sangat rentan akan adanya pengaruh politik. Misalnya saja, posisi chief executive officer (CEO) atau Kepala Danantara diisi Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani, sedangkan jabatan Ketua Dewan Pengawas Danantara diisi oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Jika di telisik, sejatinya dalam hierarki kedua entitas tersebut memiliki kedudukan yang sama. Sehingga muncul pertanyaan siapa yang akan mengawasi dan siapa yang akan diawasi? Hal ini seperti menjadi percuma.⁴¹ Dalam prinsip Santiago sebagaimana dikutip dari laman International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) menekankan harus adanya transparansi, tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan praktik investasi yang bijaksana sekaligus mendorong dialog yang lebih terbuka dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kegiatan SWF.⁴²

Lebih jauh lagi dari 24 poin prinsip santiago salah satu poin tepatnya di angka 6 menegaskan, kerangka tata kelola untuk SWF harus kuat dan menetapkan pembagian peran serta tanggung jawab yang jelas dan efektif guna memfasilitasi akuntabilitas serta kemandirian operasional dalam pengelolaan SWF untuk mencapai tujuannya.⁴³ Jika dikontekstualisasikan dengan struktur kepengurusan di Danantara pembagian peran ini bisa dibilang masih harus perlu dipertimbangkan karena para pengurusnya sangat dekat dengan urusan politik yang dapat mengacaukan setiap pengambilan keputusan di Danantara. Sangat penting memastikan orang-orang yang mengurus Danantara tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik mereka, sehingga setiap keputusan yang dikeluarkan adalah memang untuk kepentingan nasional dan bukan kepentingan kelompok atau golongan.

³⁹ Devianti, S. (2025). Danantara: Ancaman Monopoli, Transparansi, dan Dampak Lingkungan dalam Program Hilirisasi. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/sintia22796/67bd3cc034777c5abc7e84c2/danantara-ancaman-monopoli-transparansi-dan-dampak-lingkungan-dalam-program-hilirisasi?page=all#:~:text=Jika%20tidak%20dikelola%20dengan%20baik,ekologis%20yang%20merugikan%20masyarakat%20luas.&text=Salah%20satu%20aspek%20yang%20paling,seluruh%20aset%20BUMN%20oleh%20Danantara.>

⁴⁰ Trikarinaputri, E. (2025). Celios Temukan 8 Masalah dan Risiko Hukum Pembentukan Danantara, Apa Saja? Diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/celios-temukan-8-masalah-dan-risiko-hukum-pembentukan-danantara-apa-saja--1217651>

⁴¹ Trikarinaputri, E. (2025). Struktur Danantara Dinilai Memberi Peluang Intervensi Politik dan Hanya Menambah Layer Birokrasi. Diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/struktur-danantara-dinilai-memberi-peluang-intervensi-politik-dan-hanya-menambah-layer-birokrasi-1212061>

⁴² Internasional Forum of Sovereign Wealth Fund (IFSWF). (2025). Khazanah Nasional Berhad. <https://www.ifswf.org/member-profiles/khazanah-nasional>

⁴³ Revo, M. (2024). RI Punya Danantara: Ini 10 Dana Investasi Pemerintah Penguasa Dunia. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/research/20241107110729-128-586396/ri-punya-danantara-ini-10-dana-investasi-pemerintah-penguasa-dunia>

Bukan tanpa alasan, jika melihat keberhasilan negara-negara lain seperti Singapura dan Malaysia dalam pengelolaan badan SWF seperti *Temasek* dan *Khazanah*, mereka sangat mengedepankan setiap keputusan yang diambil pengurus badan SWF mereka adalah untuk kepentingan negara dan bebas dari intervensi politik bahkan pemerintah, sehingga ada terjamin kemandirian dan kebebasan bagi setiap pengurus untuk mengambil keputusan yang memang bertujuan untuk kepentingan nasional.

Lebih lanjut, Dalam pengaturan Danantara ini juga sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor Pemerintah No. 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, serta Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Bagaimana tidak? Dalam penyusunan revisi dan pengundangan beberapa aturan tersebut diatas partisipasi masyarakat tidak dilibatkan dalam hal memberikan masukan, saran, dan pertimbangan serta tidak ada penyebaran informasi mengenai aturan tersebut kepada masyarakat.⁴⁴

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa mulai penyusunan, perancangan, dan bahkan adanya revisi suatu Undang-Undang tertentu harus dilakukan penyebaran oleh DPR yang tujuannya ditegaskan dalam pasal ayat 2 (dua) nya bahwa hal itu bertujuan untuk memberikan kebebasan bagi masyarakat dalam memberikan saran-saran atas aturan yang akan dibentuk tersebut.⁴⁵ Selanjutnya, dalam pasal 96 Undang-Undang yang sama juga memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis, yang mana hal itu dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, sosialisasi, dan atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi sebagaimana ditegaskan dalam ayat 1 dan 2. Namun, jika melihat perkembangannya hal-hal tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah sehingga bisa dikatakan aturan tersebut inkonstitusional.⁴⁶

Hal inilah yang menjadi permasalahan, karena bagaimana mungkin suatu kebijakan dapat dibuat dan dilaksanakan padahal pengaturan hukumnya saja belum jelas dan tidak melibatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan tentu dikhawatirkan aturan ini tidak mementingkan kepentingan masyarakat. Sehingga, ketidakpercayaan masyarakat muncul otomatis dan menimbulkan keraguan akan optimalisasi pengelolaan Danantara sebagai pusat investasi di masa yang akan datang.

Selain masalah pengaturan yang tidak jelas. Sumber dana yang akan dikelola Danantara yang berasal dari beberapa bank BUMN juga menimbulkan kekhawatiran akan tujuan yang akan dicapai Danantara ini di kemudian hari. Karena ibaratnya dana yang akan dikelola tersebut bukan dana segar tetapi berasal dari uang masyarakat. Jika terjadi kerugian atau kesalahan dalam pengelolaan dana ini, tentu dampaknya juga akan semakin luas dalam perekonomian Indonesia, sehingga dapat dikatakan Danantara ini seperti pedang bermata dua. Artinya, jika dikelola dengan baik maka tujuan untuk meningkatkan ekonomi Indonesia dapat tercapai, namun apabila terjadi kegagalan dalam pengelolaannya maka akan sangat berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia.

Sehingga untuk menjawab tantangan itu beberapa hal yang dapat dilakukan Danantara dalam memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk investasi jangka panjang dan kemakmuran masyarakat Indonesia, misalnya pertama adalah dengan memastikan bahwa pengurus yang akan mengurus Danantara adalah orang-orang independen yang tidak terafiliasi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi, sehingga dengan memastikan hal tersebut maka kepengurusan yang ada di Danantara akan terjamin dan sehat. Kedua, dalam pengelolaan investasi yang akan dilakukan harus dialokasikan pada sektor-sektor yang akan menghasilkan dampak dan keuntungan jangka panjang seperti ketahanan pangan, energi terbarukan,

⁴⁴ Indonesia Corruption Watch. (2025). Kertas Posisi Prahara BPI Danantara: Potensi “Kejahatan Sempurna” Korupsi? Diakses dari <https://icw.or.id/sites/default/files/dokumen/Kertas%20Posisi%20ICW%20--%20Revisi%20Ketiga%20UU%20BUMN%20dan%20Danantara.pdf>

⁴⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN 5234, Pasal 88 ayat (1) dan (2).

⁴⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN 5234, Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2).

manufaktur, dan infrastruktur digital.⁴⁷ Karena bidang-bidang ini akan sangat menjanjikan di masa depan mengingat perkembangan zaman yang juga semakin cepat.

Ketiga, Pengelolaan Danantara harus dipastikan tidak dipengaruhi oleh unsur politik, sehingga pengelolaannya harus diserahkan kepada pihak yang lebih kompeten di bidang investasi dan keuangan. Keempat, masalah yang sering terjadi di Indonesia ketika suatu kebijakan sudah dibuat adalah tidak adanya transparansi sehingga mengurangi mekanisme pengawasan dari seluruh pihak termasuk masyarakat. Sehingga, untuk mengatasi hal tersebut maka Danantara dapat menggunakan teknologi untuk melakukan pemantauan secara *real time* akan kinerja⁴⁸ dan perkembangan yang sudah terjadi di badan Danantara, karena dengan demikian maka setiap dapat dipastikan bahwa setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.

Terakhir, sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Danantara ini. Misalnya apa tujuannya, apa kepentingannya, bagaimana tata kelolanya, dan semua hal yang berkaitan dengan Danantara. Sehingga dibutuhkan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan perkembangan Danantara tersebut.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana telah dijelaskan diatas maka harapan Danantara ini akan berhasil menjadi badan SWF terbesar di dunia dapat dicapai dengan orientasi pada upaya jangka panjang dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Karena, tidak dapat dipungkiri berhasilnya negara-negara di dunia seperti Malaysia dan Singapura dalam membentuk badan SWF di negara mereka adalah dengan didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, independensi, dan ketatnya pengawasan yang dilakukan. Inilah yang perlu menjadi contoh dalam pengelolaan Danantara di Indonesia sebagai badan SWF yang digadang-gadang akan menjadi *super holdings* dalam upaya memajukan negara Indonesia.

4. Kesimpulan

Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan lembaga yang dibentuk sebagai instrumen strategis dalam pengelolaan investasi dan dana publik di Indonesia, dengan peran utama sebagai penasihat sekaligus eksekutor dalam pengelolaan BUMN. Fungsi Danantara meliputi pengaturan dividen serta restrukturisasi BUMN, termasuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan perusahaan. Secara konseptual, Danantara memiliki kemiripan dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) seperti Temasek di Singapura dan Khazanah Nasional Berhad di Malaysia. Namun, pendekatannya berbeda, jika SWF di negara lain bergerak dalam berbagai sektor strategis dengan dasar hukum berupa undang-undang perusahaan negara, Danantara didirikan berdasarkan persetujuan DPR melalui perubahan atas UU BUMN, yang kini tertuang dalam UU No. 1 Tahun 2025. Keunikan Danantara terletak pada orientasinya dalam menghimpun dan mengelola dana dari BUMN untuk mendorong investasi asing dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Dengan demikian, pembentukan Danantara mencerminkan upaya pemerintah dalam mengadopsi praktik internasional, namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks nasional.

Referensi

- Ali, S. (2025). Mengenal Danantara, 'Barang Baru' di Era Prabowo. Diakses dari <https://umj.ac.id/opini/mengenal-danantara-barang-baru-di-era-prabowo/>
- Artanti, A. A. (2025). Danantara Vs Temasek: Mengupas Struktur, Strategi, dan Prestasi. Diakses dari <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/akW2aX0b-danantara-vs-temasek-mengupas-struktur-strategi-dan-prestasi>
- Baihaqi, B. (2025). Danantara Disebut Sebagai SWF Terkuat ke 6 di Dunia. Diakses dari <https://www.neraca.co.id/article/216345/danantara-disebut-sebagai-swf-terkuat-ke-6-di-dunia>
- Beck, R. & Fidora, M. (2008). The Impact of Sovereign Wealth Funds on Global Financial Markets. *Intereconomics*, 43(6), 349-358.
- CNN Indonesia. (2025). Mengenal Sovereign Wealth Fund di Tengah Peluncuran Danantara. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250224145053-92-1201856/mengenal-sovereign-wealth-fund-di-tengah-peluncuran-danantara>

⁴⁷ Kompasiana. (2025). Mengenal Temasek, Inspirator Bagi Danantara. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/fery50973/67bd4f1bc925c47b2228a3c2/mengenal-temasek-proyeksi-bentuk-danantara>.

⁴⁸ Silow, M.H. (2025). Danantara: Menjadi Model SWF Sukses Ala Norwegia atau Sekadar Sarang Korupsi?. Diakses dari <https://kumparan.com/henrika-silow/danantara-menjadi-model-swf-sukses-ala-norwegia-atau-sekadar-sarang-korupsi-24aHX0CqOAH>

- Danantara Indonesia Sovereign Fund. (2025). Daya Anagata Nusantara: Untuk Kemakmuran Indonesia. Diakses dari <http://www.danantara.id/>
- Devianti, S. (2025). Danantara: Ancaman Monopoli, Transparansi, dan Dampak Lingkungan dalam Program Hilirisasi. Diakses dari https://www.kompasiana.com/sintia22796/67bd3cc034777c5abc7e84c2/danantara-ancaman-monopoli-transparansi-dan-dampak-lingkungan-dalam-program-hilirisasi?page=all#goog_rewarded
- Febriyanta, I. M. M. (2021). Mengenal Sovereign Wealth Fund, Dana Investasi untuk Masa Depan Bangsa. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13654/Mengenal-Sovereign-Wealth-Fund-Dana-Investasi-untuk-Masa-Depan-Bangsa.html>.
- Grehenson, G. (2025). Pakar UGM Ungkap Dampak Positif dan Negatif Kemunculan Danantara, Universitas Gadjah Mada. Diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/pakar-ugm-ungkap-dampak-positif-dan-negatif-kemunculan-danantara/>
- Harjono, D.K. (2017). Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Hasan, M. & Azis, M. (2018). Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat, Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal. Edisi Kedua. Makassar: CV. Nur Lina.
- Indonesia Corruption Watch. (2025). Kertas Posisi Praharu BPI Danantara: Potensi “Kejahatan Sempurna” Korupsi? Diakses dari <https://icw.or.id/sites/default/files/dokumen/Kertas%20Posisi%20ICW%20--%20Revisi%20Ketiga%20UU%20BUMN%20dan%20Danantara.pdf>
- Internasional Forum of Sovereign Wealth Fund (IFSWF). (2025). Khazanah Nasional Berhad. Diakses dari <https://www.ifswf.org/member-profiles/khazanah-nasional>
- Jamaludin, M. (2023). Indonesia Investment Authority sebagai SWF Indonesia Untuk Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 1(2), 283–301. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i2.364>
- Khazanah Nasional. (2025). Memajukan Malaysia Untuk Jangka Panjang. Diakses dari <https://www.khazanah.com.my/who-we-are/about-us/>
- Kompasiana. (2025). Mengenal Temasek, Inspirator Bagi Danantara. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/fery50973/67bd4f1bc925c47b2228a3c2/mengenal-temasek-proyeksi-bentuk-danantara>.
- Kusuma, D. C. (2022) Analisis Lembaga Pengelola Investasi Sebagai Sovereign Wealth Fund Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Nasoha, A. M. M. (2025). Danantara: Reformasi Investasi Strategis dalam Hukum dan Ekonomi. Fakultas Syariah UIN Surakarta. Diakses dari <https://syariah.uinsaid.ac.id/danantara-reformasi-investasi-strategis-dalam-hukum-dan-ekonomi/>
- Qurani, H. (2021). Mengupas Konsep Sovereign Wealth Fund Indonesia. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt616068b2a7ec4/mengupas-konsep-sovereign-wealth-fund-indonesia/>
- Revo, M. (2024). RI Punya Danantara: Ini 10 Dana Investasi Pemerintah Penguasa Dunia. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/research/20241107110729-128-586396/ri-punya-danantara-ini-10-dana-investasi-pemerintah-penguasa-dunia>
- Segal, T. (2025). What Is Temasek Holdings? Understanding Its Role and Investment Strategy. Diakses dari <https://www.investopedia.com/terms/t/temasek-holdings.asp>
- Setiawan, A. (2021). Khazanah raih Rp1,1 triliun dari penempatan saham Telekom Malaysia. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/2103118/khazanah-raih-rp11-triliun-dari-penempatan-saham-telekom-malaysia>
- Silow, M.H. (2025). Danantara: Menjadi Model SWF Sukses Ala Norwegia atau Sekadar Sarang Korupsi?. Diakses dari <https://kumparan.com/henrika-silow/danantara-menjadi-model-swf-sukses-ala-norwegia-atau-sekadar-sarang-korupsi-24aHX0CqOAH>
- Sinar Harian. (2025). Khazanah Nasional Berada di Landasan Tepat. Diakses dari <https://www.astroawani.com/berita-bisnes/khazanah-nasional-berada-di-landasan-tepat-508019>
- Temasek. (2025). History of Temasek. Diakses dari <https://www.temasek.com.sg/en/about-us/history-of-temasek>
- Tempo. (2024). Mengenal Temasek Holdings, BUMN Singapura yang Disebut-sebut Akan Ditiru Prabowo. Diakses dari <https://swa.co.id/read/451853/mengenal-temasek-holdings-bumn-singapura-yang-disebut-sebut-akan-ditiru-prabowo>

- Trikarinaputri, E. (2025). Celios Temukan 8 Masalah dan Risiko Hukum Pembentukan Danantara, Apa Saja? Diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/celios-temukan-8-masalah-dan-risiko-hukum-pembentukan-danantara-apa-saja--1217651>
- _____. (2025). Struktur Danantara Dinilai Memberi Peluang Intervensi Politik dan Hanya Menambah Layer Birokrasi. Diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/struktur-danantara-dinilai-memberi-peluang-intervensi-politik-dan-hanya-menambah-layer-birokrasi-1212061>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- Wahyuni, W. (2025). Mengenal Danantara dan Dasar Hukumnya. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-danantara-dan-dasar-hukumnya-lt67b5de78c441a/?page=2>.
- Wirayuda, R. (2025). Antara Temasek, 1MBD, dan Danantara. Diakses dari <https://www.historia.id/article/antara-temasek-1mdb-dan-danantara-6mgE9>